

Katalog : 4102002.8205



KANTOR BUPATI HALMAHERA UTARA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**



KANTOR BUPATI HALMAHERA UTARA

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

2018

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2018

ISSN	: -
No Publikasi	: 82050.1923
No. Katalog BPS	: 4102002.8205
Ukuran Buku	: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman	: viii + 86 halaman
Naskah	: Moh. Rizky Firman Abadi, SST.
Infografis	: Dila Silvia, SST.
Editor	: Iradah Jayanti, SST.
Diterbitkan Oleh	: BPS Kabupaten Halmahera Utara
Dicetak Oleh	:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Sengaja Dikosongkan

<https://halutkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan inayah-Nya sehingga publikasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Utara 2018” dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Publikasi ini berisi tentang penjelasan pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Harapannya hal tersebut akan dapat dijadikan sebagai indikator, saran dan masukan untuk pembangunan Kabupaten Halmahera Utara kedepannya.

Perlu diketahui bahwa publikasi ini menyajikan angka IPM metode baru. Dalam penghitungan IPM metode baru telah dilakukan beberapa perubahan serta penyesuaian IPM baik indikator yang digunakan maupun teknik penghitungannya. Sehingga diharapkan angka IPM metode baru ini lebih valid serta relevan dalam mengukur capaian pembangunan manusia.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Kritik dan saran guna perbaikan penerbitan publikasi selanjutnya sangat kami harapkan.

Tobelo, November 2019



Hariin Arrosid, SST., M.Si.
NIP. 19791025 200312 1 002

Sengaja Dikosongkan

<https://halutkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Konsep Pembangunan Manusia	8
1.3. Pengukuran Pembangunan Manusia	10
1.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	10
METODE PENGHITUNGAN PEMBANGUNAN MANUSIA	15
2.1. Perkembangan Metodologi IPM	15
2.2. Alasan Perubahan Metodologi IPM	15
2.3. Keunggulan IPM Metode Baru	17
2.4. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia.....	17
2.5. Penghitungan IPM Metode Baru	19
GAMBARAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	33
3.1. Keadaan Geografis.....	33
3.2. Penduduk.....	34
3.3. Kondisi Perekonomian.....	35
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).....	41
KESEHATAN	49
PENDIDIKAN.....	57
6.1. Harapan Lama Sekolah	57
6.2. Rata-rata Lama Sekolah.....	61
STANDAR HIDUP LAYAK.....	69
KESIMPULAN DAN SARAN	77
6.1. Kesimpulan	77
6.2. Saran.....	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru.....	18
Tabel 2.2. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM.....	25
Tabel 4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 - 2018	43

<https://halutkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Perkembangan IPM Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 – 2018.....	44
Gambar 5.1. Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara 2017 – 2018.....	50
Gambar 5.2. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 – 2018	51
Gambar 6.1. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara 2017 – 2018.....	58
Gambar 6.2. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 – 2018.....	59
Gambar 6.3. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara 2017 – 2018.....	62
Gambar 6.4. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 – 2018.....	63
Gambar 7.1. Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara 2017 – 2018.....	70
Gambar 7.2. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara, 2014 – 2018	71

Sengaja Dikosongkan

<https://halutrab.bps.go.id>



1

PENDAHULUAN

<https://halutkab.bps.go.id>



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

“ IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan indeks yang mengukur pembangunan manusia dari 3 ASPEK DASAR yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. ”

3 MANFAAT PENGHITUNGAN IPM



mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup masyarakat



menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah



salah satu pertimbangan penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

1.1. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dalam bahasa aslinya disebut dengan *Human Development Indeks* (HDI) merupakan pengukuran tingkat kesejahteraan suatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek utama yang meliputi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan kriteria tertentu dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Sejak tahun 1969 Indonesia menerapkan *planned economy* dengan pola *growth first then distribution of wealth*. *Planned economy* ini menunjukkan keberhasilan terutama dilihat dari indikator makro ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan pendapatan yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, kestabilan nilai tukar rupiah, rendahnya tingkat pengangguran dan perbaikan sarana perekonomian.

Data ekonomi periode 1970-1980 mengenai ekonomi dan distribusi pendapatan terutama di negara yang tergolong dalam *Less Developing Country* (LDC), khususnya dinegara-negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi menunjukkan semakin tinggi pendapatan per kapita maka semakin terlihat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Berdasarkan fakta tersebut muncul pertanyaan mengapa terjadi *trade off* antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan berapa lama hal tersebut akan berlangsung. Kerangka pemikiran tersebut melandasi Hipotesis Kuznetz, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi yang positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesenjangan pendapatan. Namun, dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif.

Adanya permasalahan tersebut maka melatarbelakangi *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk mengembangkan indikator pembangunan manusia yang mampu menjawab permasalahan tersebut. UNDP kemudian merumuskan HDI yang mencakup 3 komponen dasar yang secara operasional dapat menghasilkan suatu ukuran untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia di suatu wilayah, yaitu:

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Pada perkembangannya, UNDP mengembangkan konsep dan metodologi dalam penghitungan IPM guna melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Beberapa perubahan yang terjadi selama periode 1990 sampai 2014 yaitu komponen angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah, PDB atau PDRB yang digunakan untuk menghitung kualitas hidup layak diganti dengan PNB atau PNRB, dan metode penghitungan yang dulunya menggunakan rata-rata aritmatika pada saat ini menggunakan rata-rata geometri.

Adapun alasan mengapa Indonesia menjadikan IPM sebagai metode untuk menghitung tingkat pembangunan yang telah terjadi karena adanya kesepakatan bersama masyarakat internasional untuk mencapai pembangunan milenium atau yang sering disebut dengan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang kemudian dilanjutkan

dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang berlaku untuk tahun 2016-2030. Komitmen tersebut telah disepakati oleh para pemimpin dunia pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilakukan di 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat pada bulan September 2015 yang memuat tujuh belas tujuan sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kesehatan yang Baik dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Mengurangi Kesenjangan
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
13. Aksi Terhadap Iklim
14. Kehidupan Bawah Laut
15. Kehidupan di Darat
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

1.2. Konsep Pembangunan Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Seorang individu atau suatu keluarga lazimnya mempunyai banyak keinginan, baik yang muluk-muluk maupun yang sangat mendasar. Contoh keinginan yang mendasar adalah mereka berharap keluarganya dapat hidup sehat dan berumur panjang, tinggal di lingkungan yang sehat, terbebas dari berbagai wabah, serta memperoleh akses pada sanitasi dan air bersih. Individu tersebut menginginkan keluarganya memperoleh pendidikan dan pelatihan yang baik, serta mempunyai akses pada sumber daya ekonomi yang dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Individu tersebut berharap pula mampu membawakan diri dengan baik dalam pergaulan masyarakat, serta dapat hidup dalam suasana yang bebas dan mempunyai hak untuk menyuarakan kepentingannya. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Konsep pembangunan manusia seperti diuraikan di atas berbeda dari konsep/paradigma pembangunan yang berkembang selama setengah abad terakhir. Beberapa yang terpenting diantaranya adalah: pembangunan ekonomi, kesejahteraan manusia, kebutuhan dasar manusia, dan pembangunan sumber daya manusia. Perbedaan pada paradigma pembangunan ekonomi disebutkan bahwa pertumbuhan

ekonomi memang penting dalam pembangunan manusia. Meski demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjamin pembangunan manusia. Masih banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diikuti dengan pembangunan manusia yang seimbang, seperti di negara Asia Timur. Sebaliknya, terdapat banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat sedang namun diikuti dengan pembangunan manusia yang mengesankan, misalnya Sri Lanka, Kosta Rika, serta Trinidad dan Tobago. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menjamin pembangunan manusia.

Kemudian untuk konsep kesejahteraan manusia hanya melihat manusia sebagai pihak yang berhak memperoleh manfaat pembangunan, bukan sebagai peserta aktif pembangunan. Konsep kebutuhan dasar memfokuskan diri pada sejumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat yang kurang beruntung, dan bukannya pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Lalu konsep pembangunan sumber daya manusia berfokus pada meningkatkan kemampuan atau memberdayakan manusia, bukan pemanfaatan kemampuan tersebut. Sementara itu, konsep pembangunan manusia mencakup keseluruhan aspek yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, konsep pembangunan manusia mampu mencakup lebih baik berbagai segi dan kompleksitas kehidupan manusia dibandingkan konsep pembangunan yang berkembang selama ini.

1.3. Pengukuran Pembangunan Manusia

Seperti halnya dengan pendekatan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia ini juga terukur. Berdasarkan perspektif pembangunan seperti telah diuraikan di atas, pembangunan manusia tidak diukur hanya dari pendapatan semata, namun didapat dari indeks komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Pada tahap awal penyusunan indeks, pilihan diberikan pada tiga unsur penting/pilar utama/dimensi kehidupan manusia yaitu: kesehatan (*healthy*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standart of living*).

1.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penghitungan IPM disuatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah juga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



2

METODE PENGHITUNGAN PEMBANGUNAN MANUSIA

<https://haluabooks.com>



3 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA



Dimensi Pengetahuan

dengan indikator
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
dan Harapan Lama Sekolah (HLS)



Dimensi Kesehatan

dengan indikator
Angka Harapan Hidup (AHH)



Dimensi Standar Hidup Layak

dengan indikator
Pengeluaran Per Kapita
dan Paritas Daya Beli

2.1. Perkembangan Metodologi IPM

Sejak IPM diperkenalkan pada tahun 1990, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan penghitungan IPM. Hingga pada tahun 2010, UNDP telah banyak melakukan perbaruan metodologi penghitungan IPM yang kemudian dilakukan penyempurnaan kembali pada tahun 2011 dan 2014.

Pada awalnya IPM dikenal sebagai indeks komposit tunggal yang terdiri dari tiga komponen indeks yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kemudian pada tahun 2010, komposisi IPM diubah sehingga mengandung dua unsur. Unsur pertama yaitu AHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Unsur keduanya yaitu agregasi indeks yang menggunakan rata-rata geometrik, bukan lagi rata-rata aritmetik. Lalu di tahun 2011, UNDP menyempurnakan penghitungan IPM dengan mengganti tahun dasar PNB per kapita dari yang semula berdasarkan tahun 2008 menjadi tahun 2005. Terakhir, UNDP kembali menyempurnakan penghitungan IPM pada tahun 2014. Pertama, mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi tahun 2011. Kedua, mengubah kembali metode penghitungan yang sebelumnya menggunakan rata-rata geometrik kembali ke rata-rata aritmetik. Perubahan metodologi penghitungan IPM ini diikuti oleh beberapa negara seperti India di tahun 2011, Filipina di tahun 2012, dan Cina di tahun 2013.

2.2. Alasan Perubahan Metodologi IPM

Beberapa upaya perubahan metode menghitung IPM pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi logis adanya penyesuaian

kondisi sosial dan perekonomian dunia. Tidak hanya itu, beberapa kali perubahan formula dalam mendapatkan angka IPM juga terkait erat dengan perkembangan riset dan teknologi dalam menganalisis kualitas pembangunan manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemerataan pendapatan masyarakat.

Bila diuraikan setidaknya terdapat tiga poin penting yang melandasi perubahan metodologi penghitungan IPM yang dilakukan oleh UNDP dan mendasari penghitungan IPM oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. AMH sudah tidak relevan bila digunakan kembali sebagai ukuran pendidikan yang secara utuh sebab sudah tidak tepat lagi dalam menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak lagi mampu menggambarkan pendapatan masyarakat antar daerah atau antar wilayah. Hal ini dikarenakan PDB tidak hanya memperlihatkan siklus perekonomian yang hanya dilakukan oleh masyarakat secara mikro, tetapi juga menggambarkan kondisi perekonomian yang lebih besar disumbang oleh sektor lain, misalnya investasi yang notabene memiliki siklus yang hanya menyentuh kondisi perekonomian beberapa masyarakat saja.
3. Penghitungan IPM kembali menggunakan rata-rata geometrik sebab penggunaan rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2.3. Keunggulan IPM Metode Baru

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama-sama penting.

2.4. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010).
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang merupakan sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran rata-rata lama sekolah juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan

tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.

3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 2.1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
1	2	3	4	5
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per Kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregat	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Dalam menghitung IPM, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Penentuan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena

menggunakan ukuran rupiah. Berikut tabel yang menyajikan nilai tersebut:

Tabel 2.2. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
1	2	3	4	5	6
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP\$)	10.007.436* (Rp)	107.721 (PPP\$)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli.

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara, Papua.

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

2.5. Penghitungan IPM Metode Baru

IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran (standar hidup layak).

Penghitungan Komponen IPM

1) Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. AHH didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun

hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya. AHH merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena AHH berhubungan erat dengan meningkatnya peluang lamanya kehidupan seseorang. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat mengenai cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medis dapat memperpanjang usia hidup atau harapan untuk hidup seseorang. Peningkatan usia hidup juga indikator dari semakin majunya tingkat sosial ekonomi masyarakat sehingga AHH mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.

AHH dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*) dengan input data orang/penduduk yang meninggal berdasarkan kelompok umur. Penggunaan tabel kematian berhubungan dengan kohort peristiwa pada suatu waktu tertentu. Selain dengan tabel kematian, AHH dapat dihitung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. Penghitungan dengan program ini biasanya disebut perhitungan tidak langsung karena menggunakan input data jumlah wanita usia 15 - 49 tahun per kelompok umur lima tahunan.

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

AHH_{min} : Angka Harapan Hidup minimal, yaitu 20 tahun

AHH_{maks} : Angka Harapan Hidup maksimal, yaitu 85 tahun

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar.

Penghitungan HLS menggunakan asumsi bahwa kemungkinan anak untuk tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

HLS secara langsung dapat mengukur pembangunan sistem pendidikan di setiap jenjang, sehingga mampu menggambarkan pada level mana yang menjadi prioritas pemerintah.

Indeks HLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

HLS_{min} : Harapan Lama Sekolah minimal, yaitu 0

HLS_{maks} : Harapan Lama Sekolah maksimal, yaitu 18

Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam penghitungannya, RLS mengasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan turun, atau dengan kata lain konstan.

Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Indeks RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

RLS_{min} : Rata-rata Lama Sekolah minimal, yaitu 0

RLS_{maks} : Rata-rata Lama Sekolah maksimal, yaitu 15

Faktor Koreksi Pesantren (FKP)

FKP merupakan komponen baru dalam penghitungan angka IPM yang tercakup dalam HLS. Hal ini dikarenakan HLS menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang terdapat anak sekolah sekaligus mengenyam pondok pesantren sehingga perlu memperhitungkan lama mukim atau lama mondok dalam penghitungan rasio murid (santri) bermukim serta jumlah yang sedang bersekolah dan bermukim (mondok).

Tahapan dalam menghitung FKP adalah dengan merasiokan jumlah santri bermukim dengan jumlah santri seluruhnya sehingga diperoleh rasio santri mukim.

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

Kemudian dicari jumlah santri yang bersekolah dan bermukim dengan mengalikan Rasio Santri Mukim dengan jumlah santri yang bersekolah.

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Santri Sekolah dan Mukim} \\ & = \text{Rasio Santri Mukim} \times \text{jumlah santri sekolah} \end{aligned}$$

Terakhir untuk memperoleh Faktor Koreksi Pesantren didapat dengan merasiokan Jumlah Santri Sekolah dan Mukim dengan jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah dengan 1.

$$\text{FKP} = \frac{\text{Jumlah Santri Sekolah dan Mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Kemudian untuk memperoleh indeks pengetahuan digunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{RLS}} + I_{\text{HLS}}}{2}$$

3) Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul pada setiap level provinsi hingga kabupaten/kota.

Agar tidak terpengaruh fluktuasi atau volatilitas harga setiap tahunnya, maka rata-rata pengeluaran per kapita dikonstantkan sehingga menggambarkan rata-rata pengeluaran per kapita riil. Caranya dengan membuat rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100.

Perhitungan *Power Purchasing Parity* (PPP)/paritas daya beli pada metode lama menggunakan 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung nilai PPP. Namun dengan metode yang terbaru penghitungan PPP mencakup 96 komoditas, dengan 66 komoditas merupakan komoditas berupa makanan dan sisanya sebanyak 30 jenis komoditas merupakan barang non-makanan.

Pada metode lama, *share* 27 komoditas terus menurun dari sebesar 37,52 persen di tahun 1996 menjadi 24,66 persen di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa 27 komoditas tersebut perlu ditambah agar setidaknya telah mencapai syarat kecukupan untuk digunakan dalam menghitung angka PPP sebagai bahan baku penghitungan angka pengeluaran per kapita riil.

Formula yang digunakan dalam penghitungan angka PPP adalah sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan:

p_{ik} : harga komoditas i di wilayah referensi, yaitu Jakarta Selatan

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

m : jumlah komoditas

Sementara itu dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dihitung menggunakan indeks pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Keterangan:

$pengeluaran_{min}$: pengeluaran minimal per kapita yang disesuaikan, yaitu Rp 10.007.436,-

$pengeluaran_{maks}$: pengeluaran maksimal per kapita yang disesuaikan, yaitu Rp 26.572.352,-

Penghitungan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Laju Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Pertumbuhan IPM yang bernilai positif menunjukkan terjadi kenaikan IPM dibandingkan tahun sebelumnya, semakin besarnya menunjukkan pertumbuhan yang terjadi semakin cepat. Begitu sebaliknya jika nilai pertumbuhan IPM negatif menunjukkan terjadi

penurunan nilai IPM dibandingkan tahun sebelumnya, semakin besar nilainya menunjukkan penurunan yang terjadi semakin besar. Istilah yang biasanya digunakan dalam pertumbuhan adalah terjadinya pertumbuhan secara cepat atau terjadi pelambatan.

Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi (IPM \geq 80)
- Tinggi ($70 \leq$ IPM $<$ 80)
- Sedang ($60 \leq$ IPM $<$ 70)
- Rendah (IPM $<$ 60)

Reduksi *Shortfall*

Lebih lanjut, angka IPM suatu daerah menunjukkan jarak yang harus ditempuh (*shortfall*) untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100. Artinya, nilai tersebut mengukur keberhasilan dengan melihat apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai. Angka ini dapat diperbandingkan antar daerah sehingga upaya mengurangi angka *shortfall* merupakan tantangan bagi setiap daerah. Selain itu, *shortfall* dapat digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan komponen IPM.

Penghitungan *shortfall* dapat menghasilkan perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu. Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM lebih cepat. Asumsi yang digunakan dalam pengukuran ini adalah laju perubahan tidak bersifat linier, laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Nilai reduksi *shortfall* juga dapat dihitung masing-masing komponen IPM. Formula penghitungan reduksi *shortfall* adalah sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{IPM_{ref} - IPM_t} \times 100 \right)^{1/n}$$

Keterangan:

IPM_t : IPM tahun awal (tahun referensi).

IPM_{t+n} : IPM tahun akhir (tahun yang dihitung).

IPM_{ref} : IPM referensi ideal, yaitu 100.

Ada empat kategori reduksi *shortfall* pertahun yaitu :

1. Sangat lambat jika nilainya kurang dari 1,3.
2. Lambat jika nilainya berada diantara 1,3 sampai 1,5.
3. Menengah jika nilainya berada diantara 1,5 sampai 1,7.
4. Cepat jika nilainya lebih besar dari 1,7.

Semakin besar reduksi short fall pertahun maka semakin besar kemajuan yang dicapai daerah tersebut dalam periode itu.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan IPM dalam publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selain data tersebut, digunakan pula data pendukung yang

berasal dari sumber data lain seperti data PDRB dan data Halmahera Utara Dalam Angka dari berbagai tahun.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Indikator tunggal IPM merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, sekaligus mengukur keberhasilan usaha pemberdayaan kemampuan sosial dan ekonomi penduduk wilayah tersebut. Selain mampu mengukur peningkatan kualitas kesehatan yang dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH), IPM juga mencakup pengukuran tingkat pendidikan dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta kemampuan daya beli masyarakat.

Pengukuran IPM, khususnya Kabupaten Halmahera Utara disajikan dalam rentang waktu 2013 - 2017. Untuk melihat perkembangan serta aspek keterbandingan dengan kabupaten/kota lainnya, baik dari segi waktu maupun tempat, dilakukan perbandingan dengan melihat kondisi pada tahun sebelumnya dengan tetap berfokus pada pembahasan kondisi IPM Kabupaten Halmahera Utara.

IPM sebagai indikator tunggal dan indeks komposit sederhana masih mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya, yakni kurang merefleksikan pencapaian sasaran program dengan dimensi pemberdayaan manusia. IPM hanya tepat digunakan sebagai instrumen perencanaan bila didukung dengan indikator tunggal dari sektor pembangunan lainnya. Keterbatasan lainnya adalah besaran angka IPM yang tidak memiliki besaran tertentu, kecuali perbandingan antar wilayah dan waktu. Oleh karena itu, analisis yang bisa dilakukan selalu memakai kerangka keterbandingan waktu dan daerah.



3

GAMBARAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

<https://halb.kab.go.id>



GAMBARAN UMUM

Kabupaten Halmahera Utara

Tahun 2018



1'57-2'00 LU dan
128'17-128'18 BT



Luas wilayah
3.891,62 km²



17 Kecamatan
199 Desa



Jumlah Penduduk
190.531 Jiwa



Usaha/perusahaan
12.295 unit



Pertumbuhan
Ekonomi 2,62%

3.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Halmahera Utara secara geografis terletak antara 1°57'- 2°00' Lintang Utara dan 128°17'- 128°18' Bujur Timur. Secara Administratif, Halmahera Utara mempunyai wilayah batas, yaitu:

1. Batas Utara: Selat Morotai dan Samudra Pasifik.
2. Batas Timur: Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera.
3. Batas Selatan: Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
4. Batas Barat: Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Kabupaten Halmahera Utara memiliki luas daratan sebesar 3.891,62 km². Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Galela Utara dengan luas 615,41 km², sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Tobelo dengan luas 33,51 km².

Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 199 desa, dimana Kecamatan Malifut memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 22 desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit adalah Kecamatan Tobelo Barat dan Timur dengan jumlah desa masing-masing sebanyak 6 desa.

Dilihat dari kondisi cuacanya, temperatur udara di Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2018 berkisar antara 22,0° C - 33,1° C. Suhu tertinggi dan terendah terjadi pada bulan September. Adapun rata-rata kecepatan angin antara 1 - 3 knot. Dimana kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Desember dan kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Februari dan September.

3.2. Penduduk

Penduduk merupakan obyek utama yang diharapkan peningkatan kualitasnya dalam suatu pembangunan nasional. Selain memiliki peran sebagai obyek pembangunan nasional, penduduk juga memiliki peranan sebagai subyek dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut. Penduduk sebagai subyek dalam pembangunan nasional memiliki arti bahwa merekalah penggerak utama suatu program yang telah buat.

Penduduk yang banyak dan berkualitas tentunya akan menjadi modal besar bagi pemerintah daerah yang ingin mengembangkan daerahnya. Secara sederhana, penduduk yang banyak tentunya akan menghasilkan pendapatan yang banyak pula. Namun demikian, pada era modern seperti sekarang ini penduduk yang banyak tidak serta merta menjadi keuntungan bagi wilayah tersebut karena penduduk yang banyak tetapi tidak berkualitas justru akan menjadi permasalahan bagi daerah tersebut. Ditambah pada saat sekarang ini telah banyak usaha ekonomi yang telah menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin, sehingga kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan saat ini.

Penduduk Halmahera Utara pada tahun 2018 tercatat sebanyak 190.531 penduduk yang terdiri dari 97.325 laki-laki dan 93.206 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Tobelo dengan jumlah 35.521 penduduk, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Kao Teluk dengan jumlah 4.115 penduduk. Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan, *sex ratio* seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara

lebih dari 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan pada setiap kecamatan.

3.3. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian penduduk Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha/perusahaan sebesar 12.295 usaha/perusahaan. Jumlah tersebut diluar usaha/perusahaan di sektor pertanian dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal tersebut dikarenakan pada sensus ekonomi tidak mengakomodir kedua sektor tersebut karena datanya telah diperoleh dari sensus pertanian dan data administrasi pemerintah.

Berdasarkan hasil pencacahan sensus ekonomi diketahui bahwa usaha/perusahaan di Kabupaten Halmahera Utara terbanyak berusaha di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan jumlah sebesar 6.721 usaha/perusahaan. Urutan kedua Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum dengan jumlah sebesar 1.517 usaha/perusahaan. Sebaliknya jumlah usaha/perusahaan paling sedikit di Kabupaten Halmahera Utara yaitu Real Estate dan Aktivitas Keuangan Dan Asuransi.

Dilihat dari jumlah tenaga kerjanya, maka sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2016 berdasarkan sensus ekonomi ada sektor 11.141 orang. Diikuti sektor Pendidikan dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang masing-masing sebesar 4.143 dan 2.370 orang. Sedangkan sektor yang menyerap tenaga kerja paling sedikit adalah Real Estat serta Informasi dan Komunikasi.

Nilai PDRB Halmahera Utara atas harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 5,31 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,36 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 0,47 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB 2018 mengalami kenaikan dari 3,57 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 3,67 triliun rupiah pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 sebesar 2,62 persen, lebih lambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,66 persen. Melambatnya kenaikan PDRB 2018 disebabkan karena menurunnya produksi dan melambatnya sector-sektor unggulan.

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Halmahera Utara.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 31,26 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,68 persen, disusul oleh lapangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,46 persen. Berikutnya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,12 persen dan konstruksi sebesar 6,14 persen.



4

**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
(IPM)**

<https://haluamblog.com>



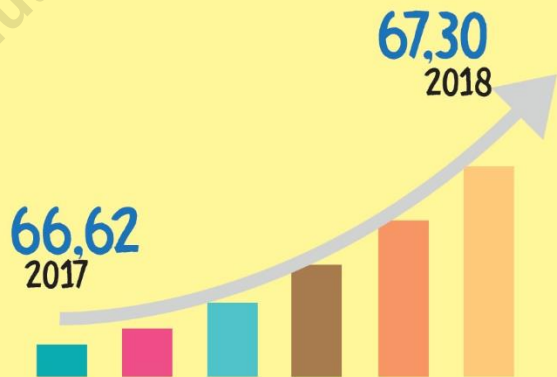
IPM 2018

Kabupaten Halmahera Utara



IPM Halmahera Utara meningkat sebesar

0,78 poin
selama tahun 2018



dan terbesar ke-3 di Provinsi Maluku Utara
setelah Kota Ternate dan Tidore Kepulauan

IPM Halmahera Utara tergolong
kategori **SEDANG** (UNDP)

4.1. Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama pembangunan menurut UNDP yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan manusia yang telah dilaksanakan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. IPM telah disepakati oleh dunia yang dijadikan alat ukur pembangunan manusia. Penghitungan IPM diukur melalui tiga pendekatan yaitu kualitas kesehatan, tingkat pendidikan dan besarnya pendapatan per kapita penduduk wilayah tersebut. Capaian pembangunan dibidang kesehatan didekati melalui Usia Harapan Hidup (UHH), capaian pembangunan dibidang pendidikan dihitung melalui pendekatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan capaian standar hidup layak dihitung melalui pendekatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM biasanya digunakan untuk melakukan penilai terkait sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap kesejahteraan penduduk daerah tersebut. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesuksesan pembangunan di wilayah tersebut yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

Capaian pembangunan yang telah dilaksanakan perlu diberikan penilaian dan evaluasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya. Adanya penilaian secara subyektif akan menjadikan kebijakan yang telah dilaksanakan

menjadi lebih baik. Pembangunan yang baik dilaksanakan secara menyeluruh dan merata sehingga dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Pembangunan juga hendaknya dilaksanakan disemua bidang yang berkaitan dengan masyarakat sehingga nantinya akan terjadi keseimbangan pembangunan.

IPM Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2018 sebesar 67,30. IPM Kabupaten Halmahera Utara tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan 8 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2010, IPM Kabupaten Halmahera Utara hanya sebesar 61,46. Ini berarti bahwa selama 8 tahun terakhir proses pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara telah berjalan secara masif. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 0,78 poin dari yang awalnya 66,52. Kenaikan ini lebih besar dibandingkan kenaikan yang terjadi tahun 2017 yang hanya sebesar 0,50 poin.

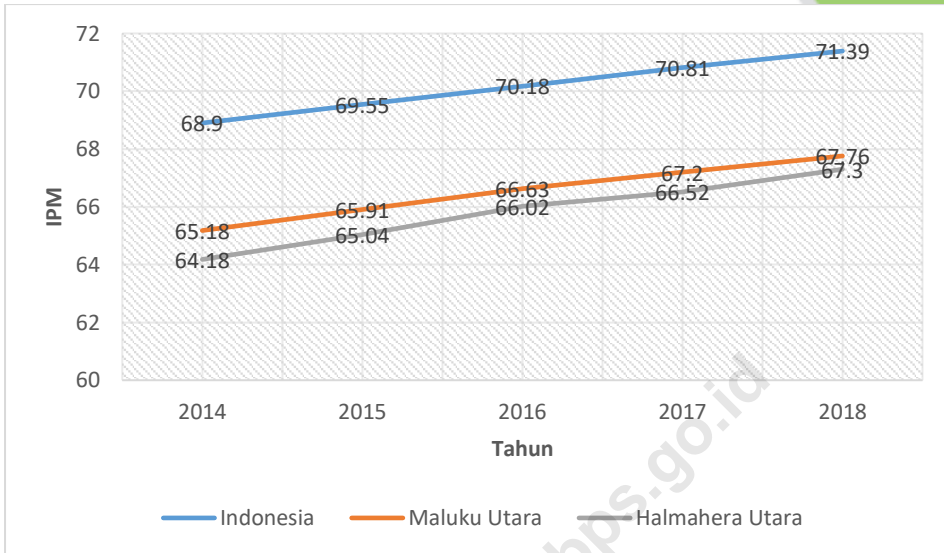
IPM Kabupaten Halmahera Utara yang sebesar 66,52 menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari tahun ke tahun. Menurut UNDP, dengan IPM 67,30 maka Kabupaten Halmahera Utara tergolong kategori sedang. Namun demikian, IPM Kabupaten Halmahera Utara masih dibawah rata-rata IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara yang mencapai 67,76.

IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 menempati posisi ketiga se-provinsi Maluku Utara. Adapun posisi pertama ditempati oleh Kota Ternate dengan IPM sebesar 79,13. Sedangkan posisi kesepuluh atau terakhir ditempati oleh Kabupaten Palau Taliabu dengan IPM 59,67. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 - 2018

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	63,83	64,19	64,54
8202	Halmahera Tengah	63,05	63,89	64,66
8203	Kepulauan Sula	61,25	62,04	62,96
8204	Halmahera Selatan	62,17	62,64	63,39
8205	Halmahera Utara	66,02	66,52	67,30
8206	Halmahera Timur	64,92	65,77	66,20
8207	Pulau Morotai	59,87	60,71	61,39
8208	Pulau Taliabu	58,66	59,03	59,67
8271	Kota Ternate	77,80	78,48	79,13
8272	Kota Tidore Kepulauan	68,37	69,25	79,13
8200	Maluku Utara	66,63	67,20	67,76

IPM Kabupaten Halmahera Utara selama ini masih berada dibawah IPM provinsi yang berarti bahwa rata-rata pembangunan manusia Provinsi Maluku Utara lebih baik jika dibandingkan Kabupaten Halmahera Utara. Keadaan tersebut disebabkan karena besarnya pengaruh Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara yang memiliki IPM tertinggi sehingga menaikkan rata-rata secara provinsi. Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya maka IPM Kabupaten Halmahera Utara lebih besar pertumbuhannya jika dibandingkan pertumbuhan IPM Provinsi Maluku Utara. Hal ini berarti bahwa Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara telah berjalan lebih cepat. Namun demikian, semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka akan semakin sulit untuk menaikkan nilainya karena semakin mendekati kondisi ideal.



Gambar 4.1. Perkembangan IPM Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 - 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2014 - 2018 nilai IPM Kabupaten Halmahera Utara masih dibawah IPM Provinsi dan Nasional. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa indikator sehingga bila IPM Kabupaten Halmahera Utara di bawah rata-rata provinsi dan nasional bukan berarti Kabupaten Halmahera Utara tertinggal di berbagai bidang. Secara lengkapnya pembahasan perindikator akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Pada bab-bab selanjutnya akan disampaikan juga beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



5

KESEHATAN

<https://halutkab.bps.go.id>



IPM 2018

Dimensi Kesehatan



“Kondisi kesehatan suatu wilayah dalam penghitungan **IPM** digambarkan dengan **Usia Harapan Hidup (UHH)**”



Usia Harapan Hidup (UHH)

memiliki arti bahwa seorang bayi yang terlahir di daerah tertentu memiliki harapan lama hidup sebesar **UHH**

UHH Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018

69,15

artinya seorang bayi yang terlahir memiliki peluang untuk hidup hingga 69.15 tahun

UHH Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017

dan menempati urutan **terbesar** ke-2 setelah Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara

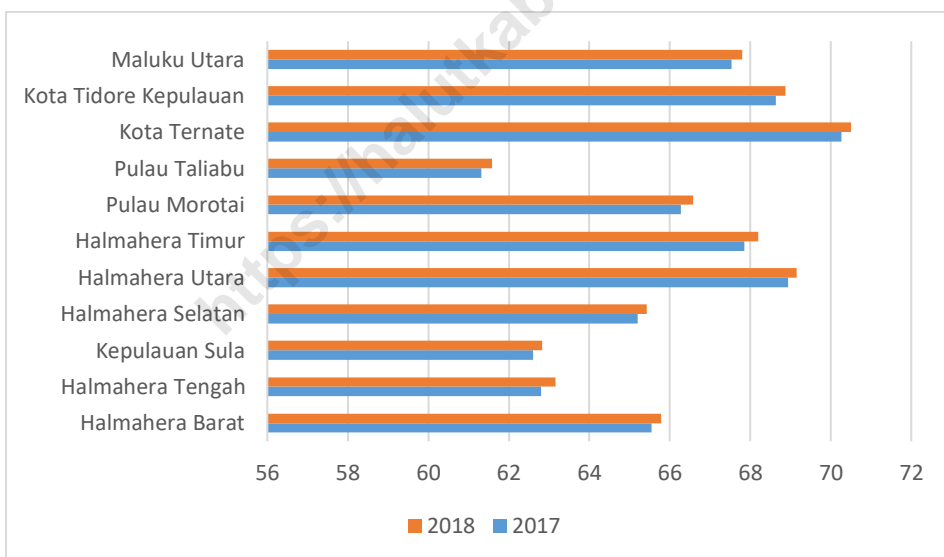
5. KESEHATAN

Kesehatan merupakan faktor penunjang pembangunan manusia yang penting dan tidak dapat diabaikan. Investasi dibidang kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Seseorang yang memiliki kesehatan prima akan membawa suasana positif dan memberikan output yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang dalam kondisi sakit.

Dalam kegiatan produksi, seseorang yang memiliki kesehatan prima juga akan mengurangi biaya produksi. Biaya produksi menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh para investor dalam melakukan usahanya. Selain itu disaat seperti ini, dimana Indonesia sedang bersiap menghadapi revolusi ekonomi 4.0 maka kualitas kesehatan manusia tidak bisa dianggap remeh. Manusia harus mampu untuk bersaing melawan teknologi dan mesin yang memiliki ketahanan jauh lebih kuat. Kemampuan manusia untuk bisa bertahan akan menjadikan manusia bertahan dalam persaingan ini.

Kondisi kesehatan suatu wilayah dalam pengitungan IPM digambarkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH). UHH memiliki arti bahwa seorang bayi yang terlahir di daerah tersebut pada tahun tersebut memiliki harapan lama hidup sebesar UHH. Semakin besar UHH maka menunjukkan semakin baik pula kondisi kesehatan di wilayah tersebut. Sebagaimana indikator sosial lainnya, pertumbuhan indikator kesehatan ini semakin mendekati angka 100 (kondisi ideal) maka akan semakin melambat.

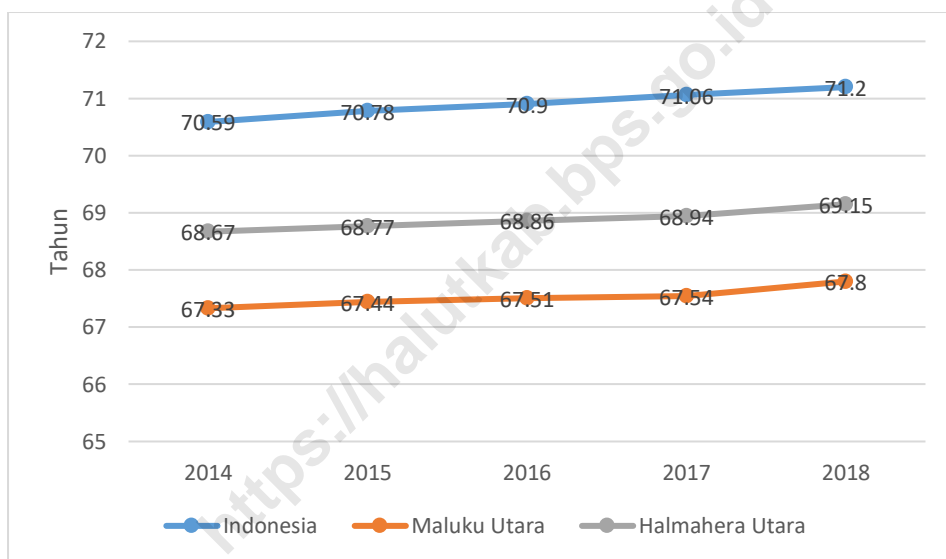
UHH Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2018 sebesar 69,15 tahun. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 68,94 tahun. UHH Kabupaten Halmahera Utara menempati urutan kedua terbesar setelah Kota Ternate yang mencapai 70,50 tahun. Semakin meningkatnya UHH Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan adanya usaha perbaikan yang masif dilakukan oleh berbagai pihak di Kabupaten Halmahera Utara dibidang kesehatan. Beberapa diantaranya ada pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan, perbaikan pelayanan kesehatan, dan program pemberian bantuan pembayaran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu.



Gambar 5.1. Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara 2017-2018

UHH Kabupaten Halmahera Utara jika dilihat secara periodik dari tahun 2014 - 2018 menunjukkan trend yang positif, meskipun dengan pertumbuhan yang semakin melambat. Hal ini merupakan

sesuatu yang wajar mengingat kesehatan merupakan faktor sosial yang memiliki batas maksimal sehingga ketika mendekati batas maksimal tersebut maka pertumbuhannya semakin lambat. Selain itu, perubahan pada faktor sosial ini biasanya tidak langsung saat itu juga kebijakan dilaksanakan maka dampaknya akan segera dirasakan. Namun, kenaikan kualitas kesehatan membutuhkan waktu sehingga dampak dari kebijakan tersebut baru dirasakan beberapa tahun kemudian.



Gambar 5.2. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 - 2018

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dimensi kesehatan merupakan indikator penting yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara, seperti:

- ✓ Mengusahakan ketersediaannya tenaga kesehatan yang berkualitas di semua fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Utara.
- ✓ Melengkapi fasilitas kesehatan sesuai dengan standar.
- ✓ Menyiapkan obat untuk mitigasi penyakit yang berbahaya seperti DBD, Malaria, dsb.
- ✓ Memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hidup sehat dan mencegah terjangkitnya penyakit.
- ✓ Menambah kuota penerima bantuan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu.
- ✓ Tanggap dan cepat bereaksi terhadap kejadian kesehatan yang tergolong KLB.
- ✓ Memasukan kurikulum terkait hidup sehat mulai dari sekolah kanak-kanak sampai perkuliahan.



6

PENDIDIKAN

<https://halutkab.bps.go.id>



IPM 2018

Dimensi Pendidikan



“ Dalam penghitungan IPM, digunakan **2** indikator untuk menentukan kondisi pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ”



Harapan Lama Sekolah (HLS)

harapan lama sekolah anak yang berusia 6–7 tahun pada periode tertentu

HLS Kabupaten Halmahera Utara

13,58 tahun

atau setingkat pendidikan perguruan tinggi Diploma I (DI)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

lamanya waktu belajar yang dihabiskan penduduk berusia 25 tahun keatas

RLS Kabupaten Halmahera Utara

8,37 tahun

penduduk usia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8.37 tahun

HLS dan RLS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017

6. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan akan membuat seseorang berpikir lebih dewasa dan matang sehingga memiliki potensi yang lebih besar untuk menyejahterahkan dirinya. Mereka yang berpendidikan memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak sehingga mampu memaksimalkan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya dan lingkungan di sekitarnya.

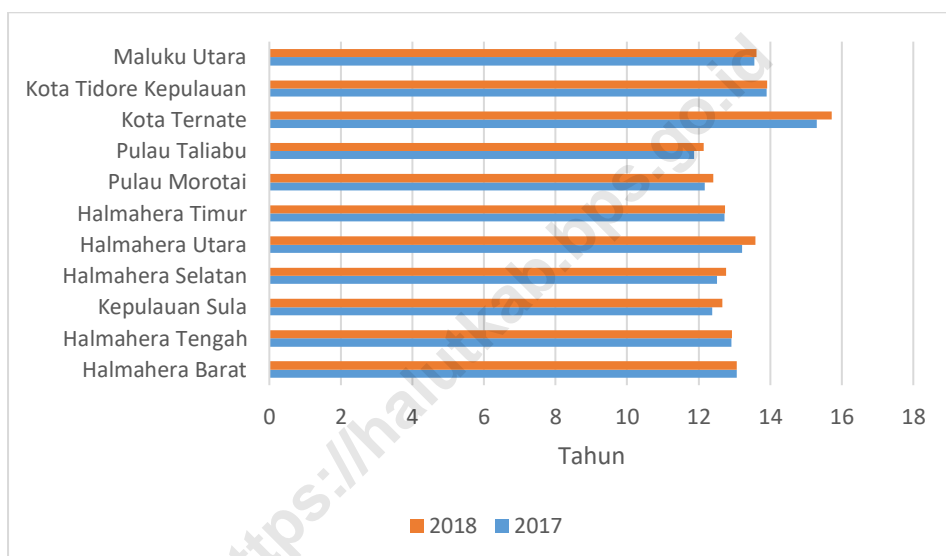
Manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mampu untuk mengikuti perkembangan yang ada sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman sangat penting karena merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri manusia terhadap keadaan dan perkembangan lingkungan sekitarnya.

Dalam penghitungan nilai IPM suatu daerah, digunakan 2 indikator untuk menentukan kondisi pendidikan yang ada yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah menunjukkan harapan lama sekolah anak-anak yang berusia 6-7 tahun pada tahun tersebut. Sedangkan rata-rata lama sekolah menunjukkan lamanya waktu belajar yang dihabiskan penduduk usia 25 tahun keatas. Kedua indikator tersebut telah menggantikan indikator lama penghitungan IPM yaitu Angka Melek Huruf yang pada saat ini dianggap sudah tidak relevan lagi.

6.1. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan indikator penting yang menunjukkan tingkat pendidikan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah menunjukkan harapan tingkat pendidikan

masyarakat seorang anak yang lahir di daerah tersebut semakin tinggi. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Adapun angka lama sekolah Kabupaten Halmahera Utara dibandingkan dengan wilayah lain selama tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

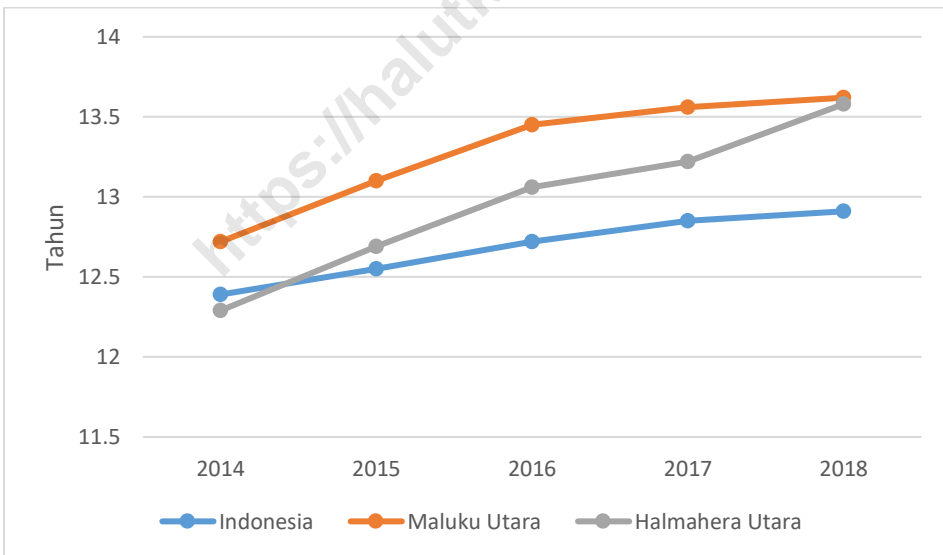


Gambar 6.1. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara 2017 - 2018

Pada tahun 2018 harapan lama sekolah anak yang berusia 6 - 7 tahun di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 13,58 tahun atau setingkat pendidikan perguruan tinggi Diploma 1 (D1). Harapan lama sekolah Kabupaten Halmahera Utara menempati urutan ke 3 di bawah Kota Ternate yang mencapai 15,72 tahun dan Kota Tidore Kepulauan yang mencapai 13,91 tahun serta masih dibawah rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Maluku Utara yang mencapai 13,62 tahun.

Dibandingkan dengan tahun 2017 maka harapan lama sekolah anak-anak di Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan sebesar 0,36 tahun.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 berada di atas rata-rata Harapan Lama Sekolah Nasional yang mencapai 12,91 tahun. Pada tahun 2014, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Halmahera Utara sempat di bawah rata-rata nasional yaitu dengan nilai sebesar 12,29 tahun dan rata-rata nasional sebesar 12,36 tahun. Namun dengan semakin baiknya sistem pendidikan yang ada dan intensifnya pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara maka kualitas pendidikan dan minat masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat.



Gambar 6.2. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 - 2018

Tingkat harapan lama sekolah anak-anak di Kabupaten Halmahera Utara yang semakin tinggi menunjukkan kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Hal ini menjadi modal yang bagus bagi Kabupaten Halmahera Utara untuk mampu bersaing dengan wilayah lain. Apalagi Indonesia pada saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang akan lebih banyak mengandalkan teknologi komputer dibandingkan tenaga manusia. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mampu menghadapi persaingan tersebut.

Bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Halmahera Utara, hal ini menjadi salah satu pertimbangan karena berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan murah. Tenaga kerja yang berasal dari dalam kabupaten tersebut akan lebih sedikit tuntutan terkait kebutuhan hidup layak yang merupakan salah satu indikator yang menentukan upah minimum regional. Namun sebaliknya jika sumber daya manusianya kurang berkualitas, maka mereka akan lebih banyak tuntutan dibandingkan meningkatkan produktivitasnya. Akibatnya investor menjadi enggan untuk menanamkan modalnya.

Beberapa upaya dapat dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan harapan lama sekolah di Kabupaten Halmahera Utara:

- ✓ Mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki anak usia sekolah terkait pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan orang tua.
- ✓ Memberikan bantuan atau perhatian khusus kepada putra daerah yang sedang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi.

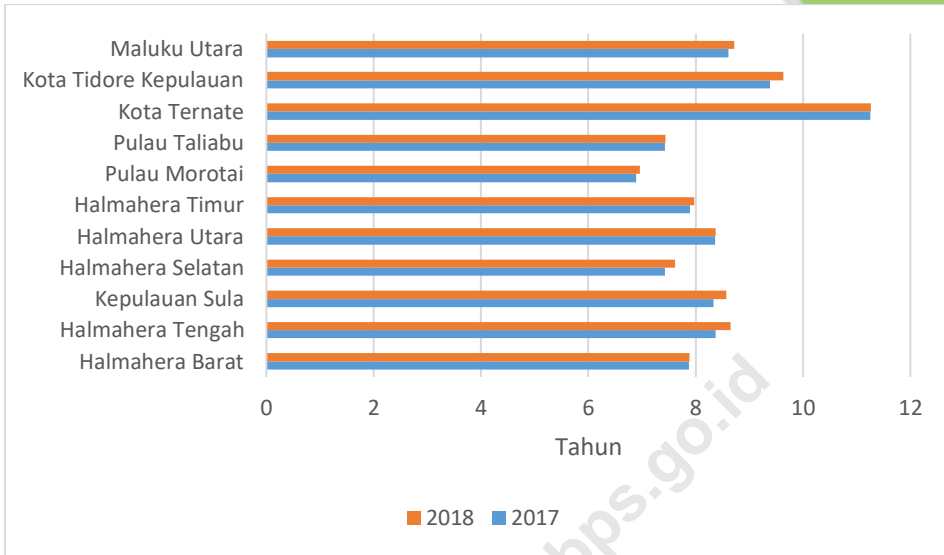
- ✓ Memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu.
- ✓ Memberi *reward* kepada putra daerah yang mampu berprestasi di jenjang pendidikan perguruan tinggi sebagai bentuk motivasi.
- ✓ Meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang berlokasi di dalam kabupaten.

6.2. Rata-rata Lama Sekolah

Berbeda dengan harapan lama sekolah, dimana anak-anak yang menjadi tujuan dari obyek analisisnya. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Rata-rata lama sekolah dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pendidikan SDM suatu daerah pada saat ini. Angka rata-rata lama sekolah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait program pendidikan yang telah dilaksanakan di waktu lampau. Sebagaimana faktor sosial lainnya yang membutuhkan waktu untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang telah diterapkan.

Adanya konsep penduduk yang digunakan oleh BPS dimana penduduk suatu daerah didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menetap lebih dari 6 bulan atau berniat menetap lebih dari 6 bulan disuatu wilayah, menjadikan rata-rata lama sekolah tersebut mencakup bukan penduduk asli. Oleh karena itu perlu adanya intensifikasi dalam pelaksanaan kebijakan nantinya.

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten/Kota se-Maluku Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

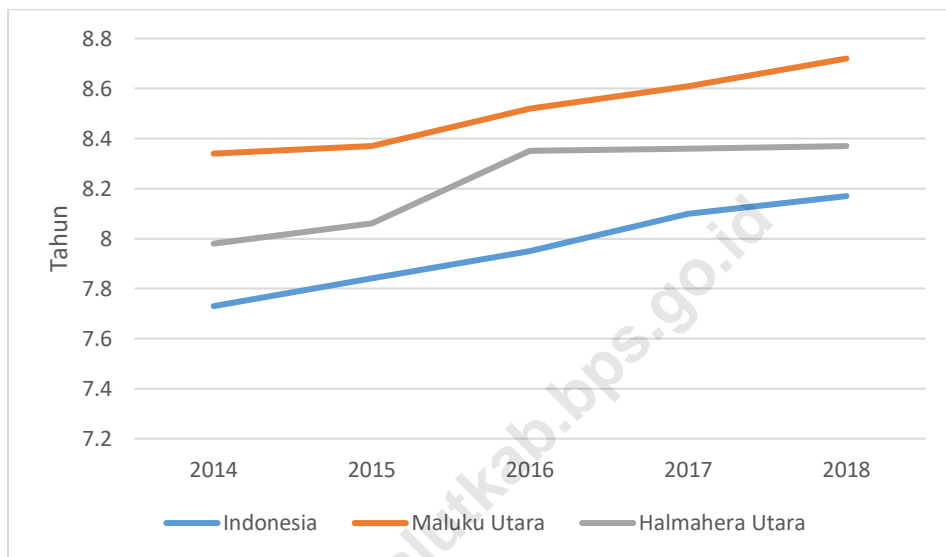


Gambar 6.3. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara 2017 - 2018

Pada gambar di atas terlihat rata-rata lama pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 sebesar 8,37 tahun atau naik 0,01 tahun dibandingkan tahun 2017. Kenaikan yang relatif kecil ini terjadi karena tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 25 tahun keatas. Kebijakan yang diterapkan saat ini baru akan terasa beberapa tahun kedepan.

Pada level provinsi, rata-rata lama pendidikan Kabupaten Halmahera Utara menempati urutan ke 5 dibawah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Kepulauan Sula. Selain itu, rata-rata lama sekolah Kabupaten Halmahera Utara masih di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Maluku Utara yang sebesar 8,72 tahun. Selisih yang cukup besar dengan rata-rata lama sekolah provinsi dikarenakan besarnya kontribusi Kota

Ternate yang memang rata-rata lama pendidikannya jauh lebih tinggi yaitu sebesar 11,26 tahun.



Gambar 6.4. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 - 2018

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.4. di atas. Perbedaan rata-rata lama sekolah Kabupaten Halmahera Utara dengan Provinsi Maluku Utara menunjukkan gap yang semakin melebar. Tentunya hal ini dapat dijadikan *warning* bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan Kabupaten Halmahera Utara terkait melambatnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Halmahera Utara.

Beberapa upaya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera atau dinas terkait untuk meningkatkan rata-rata lama pendidikan penduduk Kabupaten Hamahera Utara, seperti:

- ✓ Melaksanakan program kejar paket pendidikan bagi masyarakat yang berpendidikan rendah atau putus sekolah.

- ✓ Memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu
- ✓ Mengupayakan pendidikan dasar 9 tahun telah dirasakan semua masyarakat
- ✓ Mengadakan program-program seperti kompetisi antar sekolah, baik yang berupa kompetisi akademik maupun non akademik supaya siswa lebih termotivasi.
- ✓ Memberikan *reward* bagi penduduk yang telah melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

<https://halutkab.bps.go.id>



7

STANDAR HIDUP LAYAK

<https://halutkab.go.id>



IPM 2018

Dimensi Standar Hidup Layak



“Perhitungan **pengeluaran per kapita** dijadikan referensi oleh pemerintah dalam mencapai kebutuhan layak hidup bagi masyarakatnya”



Pengeluaran per kapita dijadikan sebagai patokan karena dapat mengetahui tingkat konsumsi masyarakat

Pada tahun 2018, **Pengeluaran per kapita** Kabupaten Halmahera Utara sebesar

7,5 juta rupiah

atau naik sebesar **217 ribu** jika dibandingkan dengan tahun 2017

Pengeluaran per kapita Kabupaten Halmahera Utara menempati urutan ke-**5** terbesar di Provinsi Maluku Utara

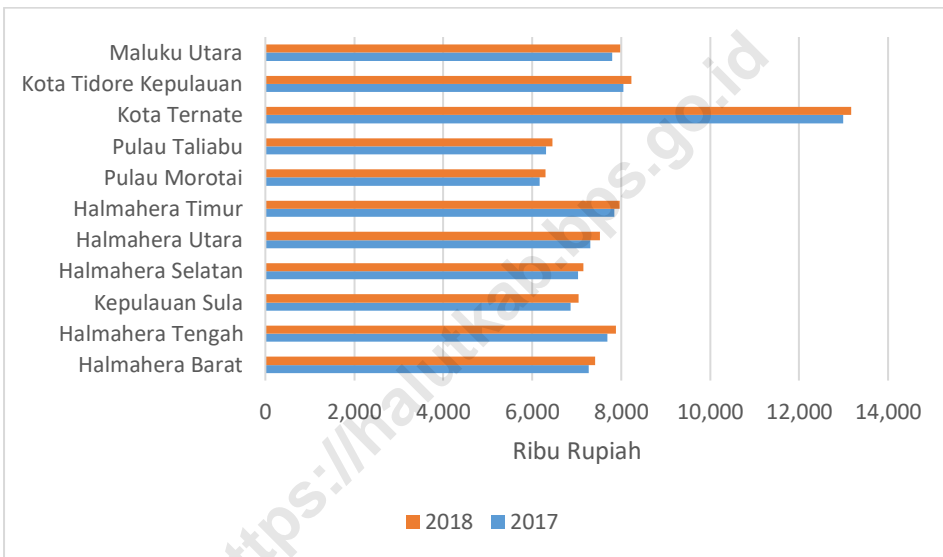
6. STANDAR HIDUP LAYAK

Penghitungan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan tidak hanya menghitung pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan, melainkan juga penghitungan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Indikator terakhir dalam pengukuran pembangunan manusia adalah standar hidup layak. Standar hidup layak suatu wilayah berdasarkan hasil rekomendasi dari PBB harusnya menggunakan PNB, namun karena pada level provinsi dan kabupaten/kota data PNB tidak tersedia maka dilakukan pendekatan melalui pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul pada setiap level provinsi hingga kabupaten/kota yang setiap semester dilakukan oleh BPS.

Pengeluaran per kapita dijadikan sebagai patakon karena dari pengeluaran tersebut dapat diketahui tingkat konsumsi suatu wilayah. Untuk mengurangi pengaruh inflasi dan faktor geografis maka dalam penghitungannya digunakan wilayah referensi dan mentransformasikan ke bentuk logaritma natural. Dengan perlakuan seperti itu maka bias pengaruh luar dapat diminimalkan.

Penghitungan pengeluaran per kapita akan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam mencapai kebutuhan layak hidup bagi masyarakatnya. Semakin tinggi nilai pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat pendapatan di daerah tersebut juga semakin besar. Pendapatan yang semakin besar akan menjadi pilihan konsumsi masyarakat semakin beragam. Selain itu, mereka juga akan mengonsumsi kebutuhan lainnya selain kebutuhan dasar.

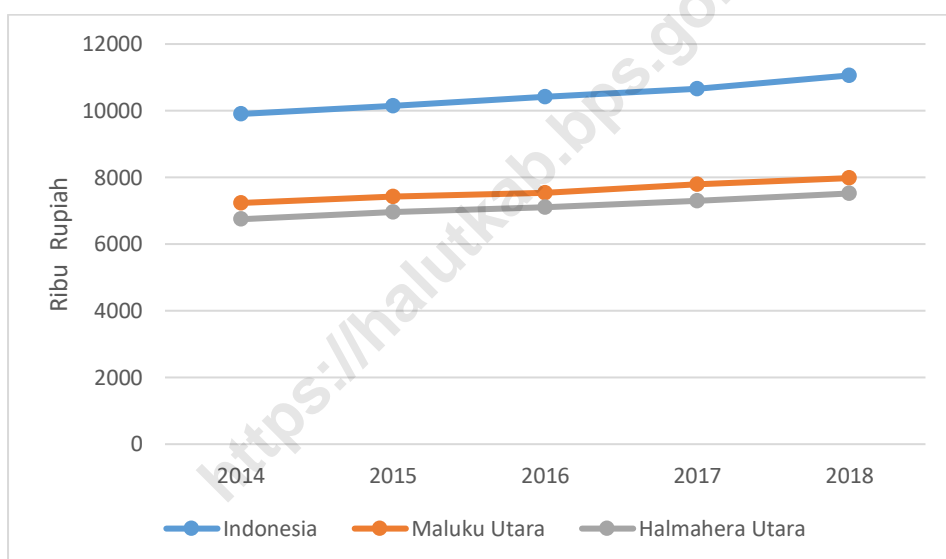
Pengeluaran konsumsi per kapita Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2018 sebesar 7.519 ribu rupiah atau naik sebanyak 217 ribu dibandingkan tahun 2017. Kabupaten Halmahera Utara menempati urutan ke 5 terbesar di bawah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.



Gambar 7.1. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara 2017 - 2018

Kenaikan pengeluaran per kapita 2018 tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Utara yaitu sebesar 217 ribu rupiah. Sedangkan yang paling rendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Morotai yaitu sebesar 127 ribu rupiah. Secara umum perubahan pengeluaran per kapita kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2018 diatas 100 ribu rupiah. Meningkatnya pengeluaran per kapita Kabupaten Halmahera utara disebabkan karena meningkat pengeluaran untuk makanan dan non makanan.

Dilihat dari perkembangan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Halmahera Utara dengan rata-rata provinsi maka terlihat pengeluaran per kapita di Kabupaten Halmahera Utara selalu lebih rendah. Lebih rendahnya pengeluaran per kapita Kabupaten Halmahera Utara dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara dan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita Kabupaten Halmahera Utara masih rendah.



Gambar 7.2. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2014 - 2018

Beberapa upaya dapat dilakukan oleh pemerintah Halmahera Utara untuk meningkatkan pengeluaran per kapita, seperti:

- ✓ Menjaga harga kebutuhan pokok
- ✓ Menjaga suply barang kebutuhan pokok

- ✓ Memberikan subsidi untuk kebutuhan dasar bagi warga kurang mampu
- ✓ Menjaga harga komoditas utama yang menjadi tulang punggung perekonomian penduduk Halmahera Utara.
- ✓ Mengajak para investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Halmahera Utara sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan.
- ✓ Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang telah berhenti sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan.
- ✓ Mendorong sekolah dan pendidikan tinggi di Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan peserta didiknya.

A decorative graphic consisting of four stylized leaves. The top-left leaf is teal and contains the white number '8'. The other three leaves are light green. The leaves are arranged in a cluster, with the teal leaf at the top left, a light green leaf to its right, another light green leaf below the teal one, and a fourth light green leaf at the bottom left.

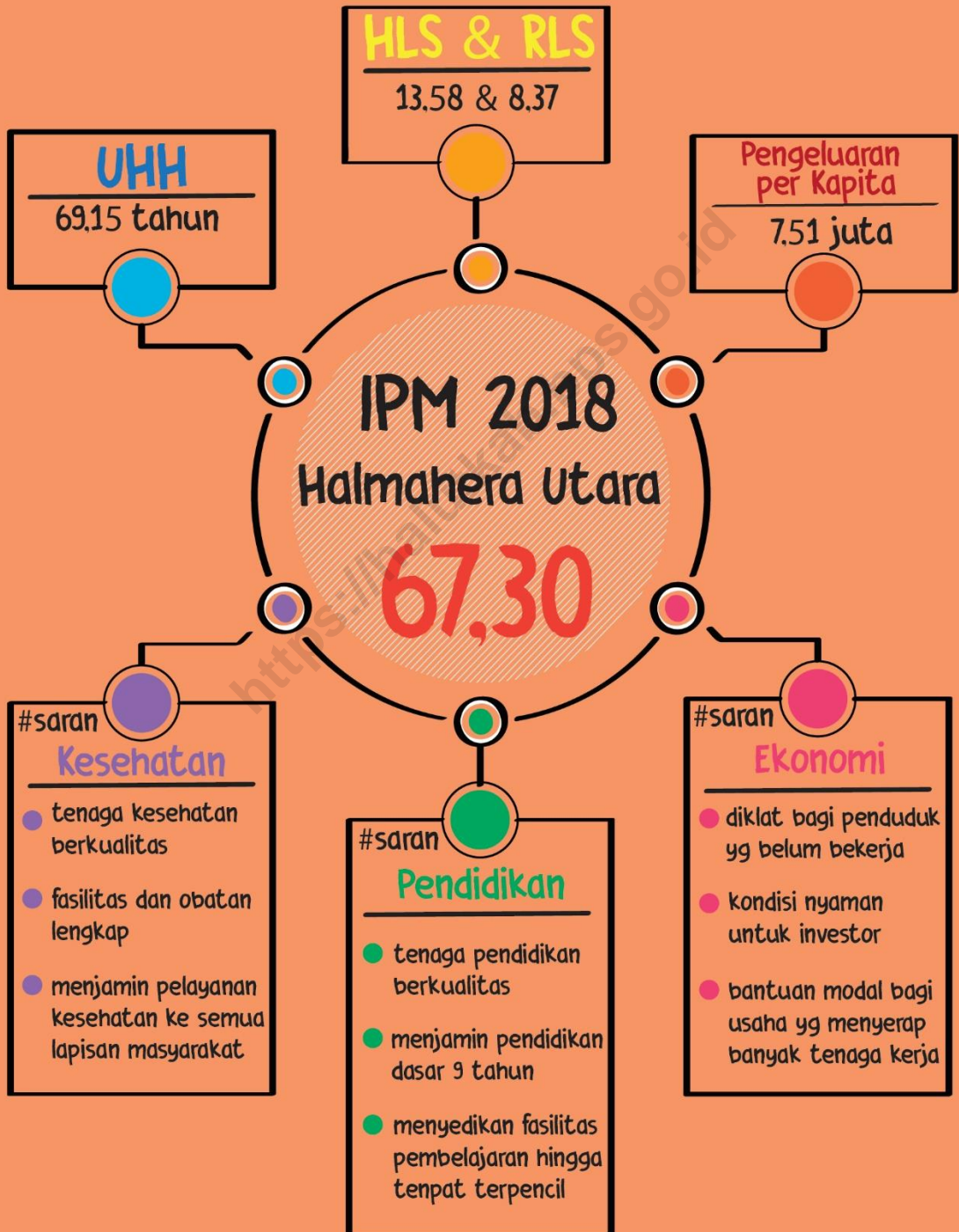
8

KESIMPULAN DAN SARAN

<https://halutkab.go.id>

A large, faint, light blue decorative graphic of a stylized leaf or flower shape, positioned behind the main text. It has a soft, semi-transparent appearance. At the bottom of the page, there is a solid teal horizontal line.

Kesimpulan & Saran



8.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan:

1. IPM Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2018 sebesar 67,30 dan menempati urutan tertinggi ketiga di Provinsi Maluku Utara setelah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.
2. Beberapa nilai komponen penyusun IPM Kabupaten Halmahera Utara 2018 seperti Usia Harapan Hidup sebesar 69,15 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,58 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,37 tahun, dan Pengeluaran per Kapita sebesar 7.519 ribu rupiah.

8.2. SARAN

Berdasarkan uraian, penjelasan dan kesimpulan yang disampaikan, terdapat beberapa saran yang penulis dapat disampaikan:

1. Dibidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Halmahera beserta dinas atau instansi terkait perlu menjamin kesehatan warga dengan menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas, fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang lengkap, tanggap terhadap kejadian luar biasa, dan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait budaya hidup sehat. Selain itu, perlu menjamin bahwa pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
2. Dibidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara beserta dinas atau instansi terkait harus menyediakan tenaga pendidikan yang berkualitas di setiap Lembaga pendidikan yang ada; menjamin semua anak-anak dan remaja di Kabupaten

Halmahera Utara telah mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun memberikan bantuan kepada biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah bagi penduduk yang tidak mampu; dan menyediakan tempat pembelajaran hingga ke tempat terpencil.

3. Dibidang ekonomi, pemerintah dan dinas terkait perlu untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang belum bekerja; menyiapkan kondisi Kabupaten Halmahera Utara yang nyaman bagi para investor; menyediakan bantuan modal bagi usaha yang telah menyerap tenaga kerja yang banyak; memberikan pelatihan dan pelatihan bagi pengusaha sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya.



LAMPIRAN

<https://halutkab.bps.go.id>



Lampiran 1. Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2018

Prov/Kab/Kota	UHH (tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Halmahera Barat	65,15	65,35	65,45	65,55	65,78
Halmahera Tengah	62,20	62,40	62,60	62,80	63,16
Kepulauan Sula	62,29	62,39	62,50	62,60	62,83
Halmahera Selatan	64,93	65,03	65,11	65,20	65,42
Halmahera Utara	68,67	68,77	68,86	68,94	69,15
Halmahera Timur	67,19	67,49	67,67	67,85	68,19
Pulau Morotai	65,78	65,98	66,13	66,28	66,58
Pulau Taliabu	60,98	61,08	61,20	61,32	61,58
Kota Ternate	69,97	70,07	70,17	70,27	70,50
Kota Tidore Kepulauan	68,33	68,43	68,54	68,64	68,87
Maluku Utara	67,34	67,44	67,51	67,54	67,80

Lampiran 2. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2018

Prov/Kab/Kota	HLS (tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Halmahera Barat	12,15	12,61	13,05	13,06	13,07
Halmahera Tengah	12,27	12,29	12,70	12,92	12,93
Kepulauan Sula	11,69	11,83	12,23	12,38	12,66
Halmahera Selatan	11,32	11,91	12,31	12,52	12,76
Halmahera Utara	12,29	12,69	13,06	13,22	13,58
Halmahera Timur	12,06	12,09	12,48	12,72	12,73
Pulau Morotai	10,92	11,59	11,92	12,17	12,41
Pulau Taliabu	10,96	11,48	11,73	11,87	12,14
Kota Ternate	14,66	15,05	15,06	15,30	15,72
Kota Tidore Kepulauan	13,09	13,27	13,74	13,90	13,91
Maluku Utara	12,72	13,10	13,45	13,56	13,62

Lampiran 3. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2018

Prov/Kab/Kota	RLS (tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Halmahera Barat	7,71	7,77	7,86	7,87	7,88
Halmahera Tengah	7,74	7,85	8,14	8,37	8,65
Kepulauan Sula	7,91	7,95	7,96	8,33	8,57
Halmahera Selatan	7,03	7,15	7,42	7,43	7,62
Halmahera Utara	7,98	8,06	8,35	8,36	8,37
Halmahera Timur	7,34	7,57	7,77	7,89	7,97
Pulau Morotai	6,84	6,84	6,88	6,89	6,96
Pulau Taliabu	7,40	7,41	7,42	7,43	7,44
Kota Ternate	11,11	11,12	11,13	11,25	11,26
Kota Tidore Kepulauan	8,72	8,91	9,11	9,39	9,63
Maluku Utara	8,34	8,37	8,52	8,61	8,72

Lampiran 4. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2018

Prov/Kab/Kota	Pengeluaran (ribu rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Halmahera Barat	6.697	6.889	7.076	7.266	7.418
Halmahera Tengah	7.130	7.359	7.481	7.688	7.885
Kepulauan Sula	6.491	6.545	6.741	6.859	7.044
Halmahera Selatan	6.704	6.791	6.894	7.026	7.156
Halmahera Utara	6.746	6.957	7.110	7.302	7.519
Halmahera Timur	7.212	7.410	7.560	7.841	7.969
Pulau Morotai	5.720	5.809	5.888	6.167	6.294
Pulau Taliabu	5.935	6.158	6.208	6.306	6.455
Kota Ternate	12.454	12.529	12.643	12.989	13.166
Kota Tidore Kepulauan	7.454	7.631	7.772	8.044	8.232
Maluku Utara	7.234	7.423	7.545	7.792	7.980

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2018

Prov/Kab/Kota	IPM				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Halmahera Barat	62,06	62,97	63,83	64,19	64,54
Halmahera Tengah	61,49	62,07	63,05	63,89	64,66
Kepulauan Sula	60,18	60,50	61,25	62,04	62,96
Halmahera Selatan	60,34	61,26	62,17	62,64	63,39
Halmahera Utara	64,18	65,04	66,02	66,52	67,30
Halmahera Timur	63,26	63,99	64,92	65,77	66,20
Pulau Morotai	58,34	59,27	59,87	60,71	61,39
Pulau Taliabu	57,31	58,26	58,66	59,03	59,67
Kota Ternate	77,15	77,64	77,80	78,48	79,13
Kota Tidore Kepulauan	66,76	67,45	68,37	69,25	69,89
Maluku Utara	65,18	65,91	66,63	67,20	67,76

<https://halutkab.bps.go.id>

Sengaja Dikosongkan



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Jl. Kawasan Perkantoran Pemda Halut, MKCM, Tobelo, Halmahera Utara
Homepage: <http://halutkab.bps.go.id> | Email: bps8205@bps.go.id